



RENCANA KERJA 2020

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kata Pengantar

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Tahun 2020 disusun sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sasaran strategis Program Ditjen PPKL, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen PPKL tahun 2020-2024 agar dapat terlaksana dengan baik maka perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 (Renja Ditjen PPKL 2020).

Renja Ditjen PPKL Tahun 2020 yang mengacu pada RENSTRA Ditjen PPKL 2020-2024 dan akan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran tahunan oleh seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada saat penerbitan DIPA penyesuaian pagu penghematan Kementerian LHK TA 2020 dan mulai dilaksanakan secara akuntabel dan semoga dokumen Renja ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan Ditjen PPKL.

Jakarta, April 2020
Dirjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan



M.R. Karliansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019	5
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019.....	5
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019.....	7
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020	9
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional	9
B. Program dan Kegiatan Tahun 2020	11
C. Rencana Kegiatan Dalam Revisi Renja PPKL.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .	3
Tabel 2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	6
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2019	6
Tabel 4. Capaian Penyerapan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2018 dan 2019	8
Tabel 5. Prioritas Nasional 2020 yang didukung Ditjen PPKL.....	9
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Ditjen PPKL Tahun 2020	10
Tabel 7. Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL Tahun 2020 berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024	11
Tabel 8. Uraian Alokasi Anggaran Program PPKL KLHK	13
Tabel 9. Rincian Pagu Anggaran Ditjen PPKL 2020 per Kegiatan	13
Tabel 10. Struktur Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2020	15
Tabel 11. Tabel Rekapitulasi Matriks Semula Menjadi Target Prioritas Nasional Ditjen PPKL TA 2020	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor..... tanggal tentang Penjabaran Pelaksanaan Renstra 2020-2024, secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2020 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Rencana kerja pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2020 merupakan hasil kesepakatan Trilateral antara Kementerian LHK dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Renja ini menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010-2020 dihadapkan pada pencemaran air dan udara dari kegiatan industri, jasa, rumah tangga, transportasi serta kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir dan laut, potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan serta semakin meningkatnya dampak akibat fenomena perubahan iklim. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2020 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) adalah sebagai berikut:

Kedudukan

Direktorat Jenderal PPKL adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal PPKL dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal PPKL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

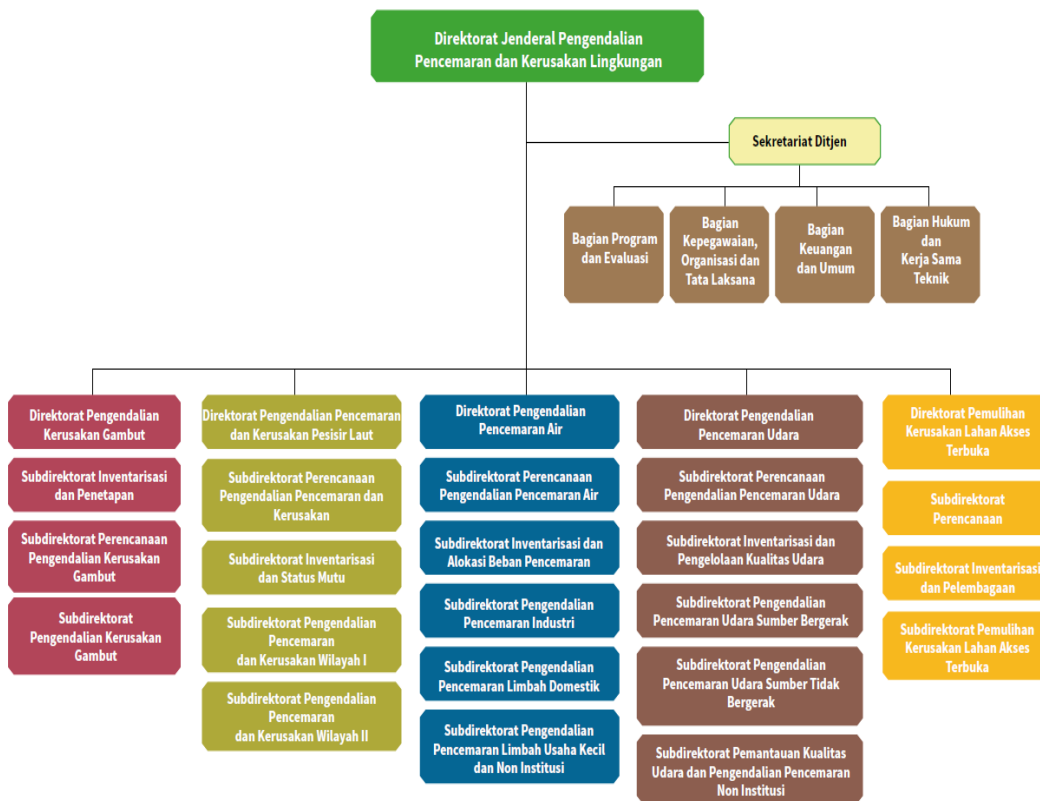
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi Ditjen PPKL didukung oleh perangkat organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air;
5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara; dan
6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal PPKL sebagaimana pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan

Sumber Daya Manusia Ditjen PPKL

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan saat ini didukung modal intelektual berupa sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup unggul. Meskipun demikian, dalam rangka menghadapi tantangan ke depan tetap diperlukan penguatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat memenuhi mandat dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tabel dibawah ini menyajikan data komposisi (jumlah) sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

No	Unit Kerja Eselon I	Pendidikan							
		S3	S2	S1/ D.IV	D.III Sederajat	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	-	1	-	-	-	-	-	1
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	1	4	29	8	17	3	3	65
2	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	-	8	14	1	1	-	-	24

No	Unit Kerja Eselon I	Pendidikan							
		S3	S2	S1/ D.IV	D.III Sederajat	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
3	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	-	6	27	1	7	-	1	41
4	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	1	6	29	2	5	1	1	45
5	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	-	1 4	27	2	2	-	-	45
6	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	-	5	19	2	2	-	1	29
7	Dipekerjakan	-	2	-	-	-	-	-	2
	TOTAL	2	46	145	16	34	4	5	252

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

Keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan dilakukan dengan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari 6 (enam) Sasaran Program yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Udara;
2. Meningkatnya Kualitas Air;
3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan;
4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut;
6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Kinerja Utama dan target yang harus dicapai, yaitu:

1. Indeks Kualitas Udara;
2. Indeks Kualitas Air;
3. Indeks Tutupan Lahan;
4. Persentase penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan lahan gambut;
6. SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai 79

Sasaran prioritas nasional Tahun 2019 adalah terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terjaganya kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indikator sasaran prioritas yang menjadi dasar evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menurunnya tingkat pencemaran;
2. Meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dan ketersediaan data serta informasi pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2015-2019 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berfokus pada hasil kerja berupa tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung

peningkatan kualitas udara, air, air laut, melakukan pengelolaan kesatuan hidrologi gambut dan tutupan lahan. Selain itu, Ditjen. PPKL melakukan pengendalian bahan-bahan pencemar dan pembinaan kerja dan tanggung jawab perusahaan pemegang ijin dalam pengelolaan lingkungan hidup. Evaluasi capaian kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari indikator-indikator kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam diagram pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Capaian 2018	% Capaian	Target	Capaian 2019	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara minimal	83	84,74	102,10	84	86,56	103,05
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air minimal	54	54	94,46	55	52,62	95,67
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan minimal	61	61	100,5	62	62	100
Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan pada areal penggunaan lainnya	3.026 Ha	3.200 Ha	105,75	1.500 Ha	1.568 Ha	104,53
Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Persentase penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut,	15%	18,80%	125,33	17,5%	39,3%	224,57
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	77	77,14	100,18	78	78,02	100,02

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Tersedianya Informasi Data Kualitas Air	Tersedianya Informasi Data Kualitas Air	3 DAS	3 DAS (Citarum, Kapuas dan Brantas)	100
2	Membaiknya Kualitas Air Satu Kelas	Pengelolaan DAS Citarum (PROKASIH)	1 DAS	1 DAS	100
3	Proporsi Jumlah Industri yang Memenuhi Baku Mutu Emisi Sebesar 75% dari 2000 Industri	Peningkatan Proporsi Jumlah Industri yang Memenuhi Baku Mutu Emisi	1.500 industri	1.834	122,27
4	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara Untuk Perhitungan IKU	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara untuk Perhitungan IKU	400 Kab/Kota	419	104,75

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
5	Luas Lahan Bekas Tambang Rakyat yang Difasilitasi Pemulihannya	Peningkatan luasan lahan terlantar bekas Pertambangan Rakyat yang Terpulihkan	30,2 Ha Kab. Kuningan (7,63 Ha), Kab. Malang (21 Ha), Kab. Belitung Timur (8,4Ha) Kab. Paser (1,174 Ha) dan Kab Buton (0,98 Ha)	40,18 Ha Kab. Kuningan (7,63 Ha), Kab. Malang (22 Ha), Kab. Belitung Timur (8,4Ha) Kab. Paser (1,17 Ha) dan Kab Buton (0,98 Ha)	133,05
6	Proporsi Jumlah Industri yang Meningkatkan Ketaatannya untuk Melakukan Rehabilitasi PascaTambang	Peningkatan Proporsi Jumlah Industri yang Meningkatkan Ketaatannya untuk Melakukan Rehabilitasi Pasca Tambang	37 industri	37 industri	100
7	Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	Jumlah Lokasi Ekosistem Pesisir Laut yang Dipulihkan Fungsinya	3 Lokasi	3 lokasi (Kabupaten Wakatobi & Lombok Tengah, Karimun Jawa)	100
8	Jumlah Lokasi Pesisir dan Laut yang Dilakukan Pengendalian Pencemaran dari Tumpahan Minyak dan Sumber Pencemar lainnya	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut dari Tumpahan Minyak dan Sumber Pencemar Lainnya	2 Lokasi	3 lokasi	150
9	Pemulihan Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	Pemulihan Lahan Gambut yang Terdegradasi	1.500 Ha	1.568 Ha	104,53

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

Tahun 2019 Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp. 230.576.059.000,- (dua ratus tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dan telah dilakukan 4 (empat) kali revisi anggaran dimana terdapat penambahan dan pengurangan anggaran yaitu penambahan anggaran pada: (1) Direktorat Pengendalian Pencemaran Air sebesar Rp. 6.500.000.000,- untuk Penambahan Dana Insentif Pengadaan Peralatan ONLIMO; (2) Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk Penambahan Dana Insentif Penyediaan Fasilitas Kantor *Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S)*; (3) Sekretariat Ditjen PPKL sebesar Rp. 4.500.000.000,- untuk Penambahan Alokasi Gaji dan Tunjangan; dan (4) pengurangan anggaran pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sebesar Rp. 10.157.288.000,- sebagai pengurangan dana hibah. Dengan demikian, pagu anggaran akhir Ditjen PPKL Tahun 2019 menjadi menjadi Rp. 263.991.965.000,- (dua ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Penyerapan anggaran Ditjen PPKL setelah adanya pengembalian negara memiliki realisasi sebesar Rp. 258.209.905.179,-* (status per Januari 2019) (dua ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan capaian penyerapan anggaran Ditjen PPKL Tahun 2019 sebesar 97,81%. Efisiensi pada kegiatan untuk mencapai indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja 2019 dengan membandingkan antara Capaian Kinerja sebesar 125,56% dengan Capaian Penyerapan Anggaran sebesar

97,81% mencapai 1,28 yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Secara rinci capaian penyerapan anggaran untuk tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Capaian Penyerapan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2018 dan 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara minimal 84	22.800.000.000	22.800.000.000	22.771.268.157	99,87	27.014.000.000	27.014.000.000	26.991.544.032	99,92
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air minimal 55	101.581.000.000	94.201.000.000	89.474.711.689	94,98	89.804.000.000	96.304.000.000	93.889.386.747	97,49
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan minimal 62	9.000.000.000	9.300.000.000	8.387.568.947	90,19	28.500.000.000	28.500.000.000	27.844.338.538	97,70
Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan pada areal penggunaan lainnya	15.000.000.000	13.650.000.000	13.569.786.152	99,41	12.000.000.000	32.940.537.000	30.753.926.017	93,36
Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Persentase penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut,	20.500.000.000	20.380.000.000	19.874.199.312	97,52	15.700.000.000	18.200.000.000	18.094.343.410	99,42
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	46.011.521.000	52.123.757.000	50.254.593.980	96,41	57.558.059.000	61.033.428.000	60.636.366.435	99,35
TOTAL		214.092.521.000	212.454.757.000	204.332.128.246	96,18	230.576.059.000	263.991.965.000	258.209.905.179	97,81

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 disusun Rencana Kerja Pemerintah atau dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang di dalamnya memuat Proyek Prioritas Nasional. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 mengusung tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan berfokus pada 5 (lima) Prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; infrastruktur dan pemerataan wilayah; nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan stabilitas pertahanan dan keamanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKP Tahun 2020 memiliki 5 (lima) Prioritas Nasional yang direncanakan dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berkontribusi langsung terhadap Prioritas Nasional ke-2 yaitu Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dan Prioritas Nasional ke-4 yaitu Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.

Ditjen PPKL secara umum dalam mendukung prioritas nasional melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan, pemantauan, pemulihan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Rencana Kegiatan Ditjen PPKL tahun 2020 pada dasarnya mengsinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun 2019 dengan rencana kerja tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 dan RKP KLHK Tahun 2020 berdasarkan PermenLHK nomor P.82 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, kegiatan Ditjen PPKL yang mendukung Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5. Prioritas Nasional 2020 yang didukung Ditjen PPKL

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output	Target	Satuan Target	Alokasi Anggaran Rp (ribuan)
02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	06- Citarum Harum	02-Penanganan Limbah Cair dan Sanitasi Kualitas Air: Klasifikasi Minimal Kelas IV	011-Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum	1	DAS	12.090.790.
			005-Data dan Informasi Kualitas Udara	510	Lokasi	31.050.000
04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara	010-Data dan Informasi Kualitas Air	631	Titik	96.439.210
			Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya	34	Provinsi	15.229.600

Program	Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output	Target	Satuan Target	Alokasi Anggaran Rp (ribuan)
		02- Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut	007-Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	34	Provinsi	4.170.400
			04- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis	012-Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	49	IPAL	50.000.000
		03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Pemulihan Gambut	001-Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi	1.800	Hektar	19.550.000
				Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	400.000	Hektar	300.000.000
			02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	001-Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	77,51	Hektar	57.138.675
			03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	001-Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya	4	Lokasi	5.900.000
Total Alokasi Anggaran Prioritas Nasional							591.568.675

Ditjen PPKL melaksanakan 2 (dua) kegiatan prioritas nasional yaitu PN 2 - Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dengan anggaran sebesar Rp.12.090.790.000,- (duabelas milyar sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) dan PN 4 - Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup dengan anggaran Rp. 294.091.795.000,- (dua ratus sembilan puluh empat milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu). Total anggaran kegiatan Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PPKL tahun 2020 sebesar Rp. 306.182.585.000,- (tiga ratus enam milyar empat seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sasaran program dan target Ditjen PPKL dalam mendukung prioritas nasional untuk Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program Ditjen. PPKL sebagai berikut :

Tabel 6. . Indikator Kinerja Utama Ditjen PPKL Tahun 2020

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara Meningkatkan	84,1
	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air Meningkatkan	55,1
	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut Meningkatkan	58,50
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatkan	61,9
	Meningkatnya kualitas Ekosistem Gambut	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	65,8

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 79,00 (A) di tahun 2020	79
---	--	----

B. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menjadi penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai beberapa tugas yang perlu diimplementasikan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan mendukung terhadap sasaran strategis Kementerian dalam Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,95 pada tahun 2020 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ditjen PPKL mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Dimana ketiga peran tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknis pada Ditjen PPKL.

Dalam mendukung prioritas nasional peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air untuk kegiatan prioritas Citarum Harum sesuai dengan Keppres No. 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan DAS Citarum, strategi Ditjen PPKL adalah melaksanakan pengendalian pencemaran di DAS Citarum berupa pengendalian sumber pencemar dari kegiatan domestik, Usaha Skala kecil, restorasi yang bertujuan untuk peningkatan kualitas air sungai Citarum. Sedangkan untuk mendukung prioritas nasional peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ditjen PPKL akan melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, air laut, industri, penanganan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pemulihan lahan gambut dan pemulihan Lahan Bekas Tambang rakyat dan pemulihan lahan akses terbuka, pemantauan kualitas lingkungan, pemulihan lahan gambut dan akses lahan terbuka, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Tabel 7. Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL Tahun 2020 berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	84,1	Tersedianya sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS)	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	10 Kota
				Tersedianya Data Indeks Kualitas Udara	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	500 Kab/Kota
				Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi	1.668 industri
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	55,1	Tersedianya data indeks kualitas air	Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual	560 titik
				Tersedianya stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	71 titik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan
				Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	1.668 industri
				Tersedianya fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum	Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	4 unit IPAL
				Tersedianya fasilitas pengendalian pencemaran air	Jumlah Fasilitas pengendalian pencemaran air	49 Unit IPAL
				Menurunnya persentase beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	0,025%
				Kab/Kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	-
3	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	55,1	Tersedianya data indeks kualitas air laut	Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya	34 Provinsi
				Terlaksananya pemantauan sampah laut dan sumber pencemar lainnya dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	Jumlah provinsi yang dilakukan pemantauan kualitas air laut dan sampah laut	34 Kab/Kota
				Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan pelabuhan	Jumlah pelabuhan yang memenuhi kriteria kinerja lingkungan	20 Pelabuhan
				Terpulihkannya ekosistem pesisir laut	Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan	4 Lokasi
4	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	61,9	Terlaksananya pemantauan kualitas tutupan lahan untuk perhitungan indeks kualitas tutupan lahan	Jumlah Provinsi yang dipantau Indeks Kualitas Tutupan Lahan	34 Provinsi
				Terpulihkannya lahan terlantar bekas pertambangan rakyat	Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	77,8 Hektar
				Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya	80 Industri
5	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Gambut	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	65,8	Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Jumlah provinsi yang dilakukan pemantauan data muka air tanah untuk pemantauan tingkat kebasahan gambut	19 Provinsi
				Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	350 Industri
				Terbentuknya desa mandiri peduli gambut	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi	60 Desa
				Tersedianya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perlindungan dan pengelolaan gambut	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG)	25 KHG
				Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	1.800 Hektar

Hasil forum *trilateral meeting* antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan dan sesuai dengan RKP KLHK tahun 2020 pagu alokasi Ditjen PPKL tahun 2020 sebesar Rp. **670.467.758.000,-** (enam ratus tujuh puluh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Ditjen. PPKL sebesar Rp. 357.472.233.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan BRG sebesar Rp. 312.995.525.000,- (tiga ratus dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah).

Tabel 8. Uraian Alokasi Anggaran Program PPKL KLHK

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ALOKASI
Prioritas Nasional :		
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup		Rp. 591.568.675.000
1	Ditjen PPKL	Rp. 291.568.675.000
	Restorasi Gambut (BRG)	Rp. 300.000.000.000
2	Belanja Pegawai Ditjen. PPKL dan BRG	Rp. 39.308.565.000
	Ditjen PPKL	
	Restorasi Gambut (BRG)	
3	Belanja Operasional Ditjen. PPKL dan BRG	Rp. 17.037.721.000
	Ditjen PPKL	
	Restorasi Gambut (BRG)	
TOTAL		Rp. 670.467.758.000

Pengalokasian anggaran tahun 2020 mengacu pada *money follow program* yang berarti penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas. Pagu tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui kegiatan untuk mendukung prioritas nasional 2020 dan dukungan management serta pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PPKL. Dalam penyusunan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan harus dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut sehingga untuk tahun 2020 pagu alokasi anggaran Ditjen PPKL dengan rincian per kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Rincian Pagu Anggaran Ditjen PPKL 2020 per Kegiatan

Kode	Kegiatan	Output	Target	Pagu Alokasi Rp (x1.000)	Persentase (%)
	Pengendalian Pencemaran Udara			31.050.000	4,6
		Tersedianya sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS)	10 Lokasi		
		Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau kegiatan	1.668 Perusahaan		
		Tersedianya Data Indeks Kualitas Udara	500 Kab/Kota		
5459	Pengendalian Pencemaran Air			158.530.000	23,6

	Tersedianya stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	71 Lokasi	96.439.210	
	Tersedianya fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum	4 Unit	12.090.790	
	Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan	1.668 Perusahaan	50.000.000	
	Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air	49 Unit		
	Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	0,025 %		
	Terlaksananya Pengawasan pada Kab/Kota terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	0 Kota/Kab		
5460	Pengendalian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut		25.300.000	3,8
	Terpulihkannya fungsi ekosistem pesisir laut	4 Lokasi	5.900.000	
	Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan pelabuhan	20 Pelabuhan		
	Terlaksananya pemantauan sampah laut dan sumber pencemar lainnya dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	40 Kab/Kota		
	Terlaksananya pemantauan kualitas air lautnya	34 Provinsi	15.229.600	
	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	2 Lokasi	4.170.400	
5461	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		57.136.575	8,5
	Terpulihkannya lahan terlantar bekas pertambangan rakyat	77,5 Hektar	57.136.575	
	Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/atau kegiatan	80 Perusahaan		
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut		19.550.000	
	Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi	1.800 Hektar	19.550.000	2,9
	Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	19 Provinsi		
	Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan	300 Perusahaan		
	Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi	60 Desa		
	Tersedianya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perlindungan dan pengelolaan gambut/ RPPEG	10 Provinsi		
	Tersedianya Peta KHG dengan skala 1 : 50.000	25 KHG		

5457	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	78.899.083	11,8
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	79	78.899.083
TOTAL		357.472.233.000	

Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PPKL tahun anggaran 2020 ini seluruh Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai dan Operasional) dikumpulkan di satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sehingga anggaran yang ada di satuan kerja adalah Anggaran Belanja Non Operasional. Hal ini turut mendukung arahan Presiden RI tentang proses penganggaran *money follow program* (prioritas nasional) pada RKP tahun 2020.

Tabel 10. Struktur Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2020

Sumber Dana	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal	Jumlah
		Operasional	Non Operasional		
Rupiah Murni (RM)	30.608.565.000	12.742.196.000	218.523.400.000	95.598.072.000	357.472.233.000
	8,56%	3,56%	61,13%	26,74%	100%

Belanja Non Operasional senilai Rp 218.523.400.000,- atau sebesar 61,13% dari total pagu alokasi digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan teknis yang bersifat prioritas nasional dan kegiatan lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan Rencana Kerja Ditjen PPKL Tahun 2020 untuk mencapai target Renstra Ditjen PPKL 2020-2024.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Revisi Rencana Kerja (RENJA) Ditjen PPKL Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, RKP KLHK tahun 2020, Renstra Ditjen PPKL tahun 2020-2024 dan pagu indikatif serta memuat kebijakan program pada kegiatan pembangunan lingkungan hidup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Revisi Rencana Kerja (RENJA) ini berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu perubahan bagi seluruh jajaran Ditjen PPKL.

Revisi RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Ditjen PPKL sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PPKL TAHUN 2020

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 Sasaran Program : 1. Meningkatnya Indeks kualitas Udara
 1. Meningkatnya Indeks kualitas Air
 2. Meningkatnya Indeks kualitas Air Laut
 3. Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan										
1	Pengendalian Pencemaran Udara									31.050.000
	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Udara									
		Tersedianya Data Indeks Kualitas Udara	Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	051-Pemantauan Kualitas Udara secara Manual	500 Kab/Kota	34 Provinsi	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.1 Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	8.320.000
		Tersedianya sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS)	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	052-Pemantauan Kualitas Udara Secara Otomatis	10 Kota	Kota Pangkal Pinang, Kota Serang, Kota Samarinda, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Gorontalo, Kab. Mamuju, Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Manokwari	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.1 Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	19.780.000

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
		Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi	051- Evaluasi Kinerja Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Udara	1.668 Industri	33 Provinsi	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.2 Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan	2.950.000
2	Pengendalian Pencemaran Air									158.530.000
	Tersedianya Data Kualitas Air									96.439.210
		Tersedianya data indeks kualitas air	Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual	051- Pemantauan Kualitas Air Manual	560 titik	34 Provinsi	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.1 Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	6.965.000
			Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	052- Pemantauan Kualitas Air Otomatis	71 titik	DAS Limboto (Gorontalo), DAS Brantas (Jatim), DAS Kapuas (Kalbar), DAS Siak (Riau), DAS Batanghari (Jambi), DAS Jeneberang (Sulsel), DAS Citanduy (Jateng), DAS Barito (Kalsel), DAS Mahakam (Kaltim), DAS Ciliwung (Jabar), DAS Progo (DIY), DAS Mesuji (Lampung), DAS Ayung (Bali), Sungai Surabaya (Jatim), Kali Jagir (Jatim), Kali Gunung Anyar (Jatim), Kali Bekasi	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.1 Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	77.160.300

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
						(Jabar), Kali Cilengsi (Jabar), Kali Code (DIY), Sungai Maros (Sulsel), Sungai Kampar (Riau), Sungai Metro (Malang), Sungai Bango (Malang), Sungai Porong (Jatim), SungaiComal(Jateng) , Sungai Talo (Sulsel), Sungai Brojo (Jateng), Kali Opak (DIY), Sungai OYO (DIY), Kali Krasak (DIY), Saluran Mataram (DIY), Waduk Gajah Mungkur (Jateng), Sungai Elo(Jateng), Kali Madiun (Jatim), Sungai Kasembon (Malang), Bengawan Jero (Jatim), Waduk Gondang (Jatim), Sungai Lamongan (Jatim), Sungai Metro (Malang), Kali Bodri (Jateng), Sungai Bogowonto (Jateng), Sungai Juwana (Jateng), Sungai Lusi (Jateng), Kali Serang (Jateng), Sungai Tuntang (Jateng), Kali Angke (Banten), Sungai Ci Mandiri (Banten), Danau				

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
						Batur (Bali), Danau Maninjau (Sumbar), Danau Rawapening (Jateng), Danau Singkarak (Sumbar), Danau Sentani (Papua), Danau Tondano (Sulut), Wilayah Jawa Barat atau DAS Citarum meliputi Waduk Jatiluhur, Muara CiWidey, Muara Ci Minyak, Muara Ci Meta, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Muara Ci Sokan, Muara Ci Beet, Muara Ci Kao, Muara Ci Karang, Muara Ci Dadap, Muara Ci Somang, Muara Ci Kundul, Muara Ci Haur, Muara Ci Rasea, Ci Kapundung, Ci Tarik, Ci Sangkuy				
				053-Perhitungan dan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran	2 DAS		--	--	--	1.000.000
				054-Pelaksanaan Program Kali Bersih	10 Kab/Kota		--	--	--	1.500.000
		Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang	051-Peningkatan kinerja industri dalam	1.668 industri	34 Provinsi	--	--	--	7.380.000

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)	
		pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan	memenuhi baku mutu air limbah	Pengelolaan Lingkungan Hidup							
				052- Evaluasi kinerja industri dalam pengendalian pencemaran air limbah			PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.2 Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan	2.433.910	
Terkendalinya Pencemaran Air di DAS Citarum										12.500.000	
		Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum	Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	051-Pengelolaan Limbah DAS Citarum	1 DAS (4 Unit IPAL)	Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bandung	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.2 Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan	12.500.000	
Tersedianya Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air										50.000.000	
		Tersedianya fasilitas pengendalian pencemaran air limbah	Jumlah Fasilitas infrastruktur hijau pengelolaan air limbah	051-Pengelolaan airLimbah	49 Unit		PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.2 Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan	50.000.000	
3	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut										25.300.000
	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut										5.900.000
		Terpuhikannya ekosistem pesisir laut	Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang	051-Pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut	4 Lokasi	Kab. Lombok Utara, Kab. Berau, Kab. Kepulauan Selayar, Kota Ternate	PP 1. Meningkatnya Kualitas	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan	Pro-PN 1.3.5 Pemulihan Kerusakan Lingkungan	3.900.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
			dipulihkan fungsinya				Lingkungan Hidup	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pesisir dan Laut	
				053-Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	2 Lokasi	Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara	--	--	--	2.000.000
Tersedianya data dan informasi kualitas air laut										15.229.600
		Tersedianya data indeks kualitas air laut	Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya	051-Pemantauan kualitas air laut	34 Provinsi	34 Provinsi	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.1 Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	5.800.000
				052- Evaluasi Kinerja Pelabuhan	20 Pelabuhan	Provinsi Aceh, Kota Medan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kab. Badung, Kota Balikpapan, Kota Bitung, Kota Makassar	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.2 Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan	1.200.000
				053- Perizinan pembuangan air limbah ke laut	25 Izin	DKI Jakarta	--	--	--	1.000.000
				054- Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	3 Kegiatan	Kota Denpasar	--	--	--	3.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
				Berbasis Daratan (Clean Seas)						
				055- Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	4 Dokumen	DKI Jakarta	--	--	--	3.429.600
				056- Pengembangan Program Pesisir dan Laut Lestari	1 Dokumen	DKI Jakarta	--	--	--	800.000
Meningkatnya jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut										4.170.400
		Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	051- Penanggulangan pencemaran Tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir laut	2 Lokasi	Kab. Bintan, Kota Batam	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.1 Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	1.000.000
				052- Pemantauan sampah laut dan integrated coastal clean up	34 Provinsi	34 Provinsi	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.1 Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	3.170.400
4	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka									57.138.675
	Meningkatnya luasan lahan bekas pertambangan yang terpulihkan									57.138.675
		Terpulihkannya lahan bekas pertambangan rakyat	Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	051 - Pemulihan Kerusakan Lahan Bekas Tambang	77,5 Hektar	Kab. Padang Pariaman, Kab. Katingan, Kab. Landak, Kab. Wakatobi, Kab.	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya	Pro-PN 1.3.3 Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan	53.588.675

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
						Banjarnegara		Alam dan Lingkungan Hidup	Terkontamina si Limbah B3	
				052 - Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan	33 Provinsi	33 Provinsi	--	--	--	1.700.000
		Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang	051 - Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Aspek Kerusakan Lahan Industri Pertambangan	80 industri	Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.2 Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan	1.850.000
5	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut									19.550.000
	Pemulihan Ekosistem Gambut									19.550.000
		Terlaksananya Pemulihan lahan gambut yang tergradasi	Jumlah lahan gambut tergradasi yang dilakukan pemulihan	051 - Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dan Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG	25 KHG	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat,	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.4 Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	12.110.397
				052 - Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan	10 Dokumen	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Riau, Jambi,	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya	Pro-PN 1.1.4 Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	1.362.593

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
				Ekosistem Gambut		Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara		Alam dan Lingkungan Hidup		
				053 - Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut	1.800 Hektar	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	4.679.790
			<i>Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat</i>							
			<i>Program Penyiapan Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut</i>	60 desa						
				054 - Evaluasi kinerja industri dalam pemulihan ekosistem gambut	300 industri	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.1.4 Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	1.397.220
Badan Restorasi Gambut										300.000.000
Pemulihan lahan gambut melalui restorasi di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan										300.000.000
		Terlaksananya pemulihan lahan gambut melalui restorasi di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan	Koordinasi Pelaksanaan Restorasi Gambut	051 - Koordinasi Bidang Perencanaan dan Kerjasama	1 Dokumen	DKI Jakarta	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	27.000.000
				052 - Koordinasi Bidang	32.150 Hektar	DKI Jakarta	PP 1. Meningkatnya	KP 1.3. Pemulihan	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan	58.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
				Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan			Kualitas Lingkungan Hidup	Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemulihan Lahan Gambut	
				053 - Koordinasi bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemiteraan	75 Desa	DKI Jakarta	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	19.000.000
				054 - Koordinasi bidang Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	DKI Jakarta	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	16.000.000
				055 - Koordinasi Pelaksanaan Restorasi Gambut	1 dokumen	DKI Jakarta	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	38.000.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Restorasi Gambut	054 - Fasilitasi Restorasi Gambut di Provinsi Riau	65.410 Hektar	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hilir	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	20.700.000
				055 - Fasilitasi Restorasi Gambut di Provinsi Sumatera Selatan	60.150 Hektar	Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas Utara	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	31.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target	Lokasi	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Pagu Anggaran (Ribu Rupiah)
								Alam dan Lingkungan Hidup		
				056 - Fasilitas Restorasi Gambut di Provinsi Jambi	19.384 Hektar	Kab. Merangin, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Barat	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	6.500.000
				057 - Fasilitas Restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Barat	49.957 Hektar	Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	16.500.000
				058 - Fasilitas Restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah	54.051 Hektar	Kab. Kapuas, Kab. Barito Selatan, Kab. Seruyan	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	53.500.000
				059 - Fasilitas Restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Selatan	9.000 Hektar	Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Utara	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	4.500.000
				060 - Fasilitas Restorasi Gambut di Provinsi Papua	9.898 Hektar	Kab. Merauke, Kab. Mappi	PP 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro-PN 1.3.1 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	9.300.000

LAMPIRAN II

Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2020

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
029.13.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		357.472.233.000
5457	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	1 Layanan	65.903.558.000
5457.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line]		22.552.797.000
5457.950.001	KP Ditjen PPKL		22.552.797.000
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan		3.487.756.000
A	Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2021		2.732.394.000
B	Penyusunan Rencana Aksi Ditjen. PPKL Tahun 2021		93.600.000
C	Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Ditjen PPKL Tahun 2021		341.942.000
D	Pengembangan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2021		319.820.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
052	Penyusunan Rencana Anggaran		708.976.000
A	Unit Layanan Pengadaan (ULP)		182.390.000
B	Koordinasi,Sinkronisasi dan Sosialisasi Penyusunan RKAKL dan DIPA Ditjen. PPKL		526.586.000
053	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		1.260.705.000
A	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen PPKL		340.460.000
B	Pemantauan Pelaksanaan SAKIP DITJEN PPKL		610.030.000
C	E-MONEV DITJEN PPKL		310.215.000
054	Pengelolaan Data dan Informasi		2.546.065.000
A	Media Komunikasi dan Publikasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		1.795.170.000
B	Data Statistik		127.050.000
C	Pameran Lingkungan Hidup dan Kehutanan		623.845.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
055	Pengelolaan Keuangan		778.490.000
A	Evaluasi Perdirjen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Perlengkapan dan Ketatausahaan		210.594.000
B	Pertemuan Koordinasi dalam rangka Evaluasi dan Optimalisasi Pengelola Anggaran		312.176.000
C	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Eselon I dan UAKPA Tahunan		255.720.000
056	Pengelolaan Perbendaharaan		312.200.000
A	Penyegaran Pengelolaan Anggaran		312.200.000
057	Pelayanan Hukum		1.500.000.000
A	Penataan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		881.855.000
B	Fasilitasi Layanan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi		264.240.000
C	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan Lingkup Direktorat Jenderal PPKL		353.905.000
058	Pengelolaan Kepegawaian		1.980.531.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
A	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan		154.433.000
B	Penilaian Dupak Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan		138.792.000
C	Pembinaan Pegawai		395.490.000
D	Penyusunan Kebijakan Jabatan Fungsional Pedal		608.128.000
E	Sosialisasi Kebijakan, Pemantauan Dan Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Jf Pedal		184.617.000
F	Layanan Administrasi Kepegawaian		274.523.000
G	Peningkatan Kapasitas Pegawai/Pejabat Struktural Berbasis Kompetensi		224.548.000
059	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		4.550.567.000
A	Honorarium		8.160.000
B	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi (Peningkatan Kapasitas) Pengelolaann dan Layanan Intern		264.752.000
D	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMN		398.345.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
E	Pengadaan Peralatan Mesin		2.932.000.000
G	Penyusunan RK BMN dan Penghapusan BMN		158.781.000
H	Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah/bantuan ke kelompok Masyarakat/pemerintah Daerah		234.920.000
I	Perjalanan Dinas dalam rangka Pengecekan Fisik dan BAST		553.609.000
060	Pelayanan Rumah Tangga		1.432.850.000
A	Pelaksanaan Eco Office		484.000.000
B	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan		103.448.000
C	Pengelolaan Arsip Aktif		110.612.000
D	Koordinasi Kegiatan Pimpinan		734.790.000
062	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi		2.081.342.000
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		808.142.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
B	Analisis Struktur Organisasi		200.600.000
C	Evaluasi dan Penyempurnaan Peta Bisnis Proses dan SOP		190.400.000
D	Sosialisasi dan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		170.300.000
E	Penyusunan Kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL		392.200.000
F	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan		319.700.000
063	Pengelolaan Kerjasama Teknik		1.913.315.000
A	Penyusunan Naskah Kerjasama Teknik Lingkup Ditjen PPKL		595.439.000
B	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Teknik nLingkup Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		1.317.876.000
5457.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1 Layanan	43.350.761.000
5457.994.001	KP Ditjen PPKL		43.350.761.000
001	Gaji dan Tunjangan		30.608.565.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		16.936.920.000
B	Tunjangan Kinerja		13.671.645.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		12.742.196.000
A	Pelayanan Pos dan Giro		90.000.000
B	Pelayanan kerumahtanggaan		1.258.776.000
C	Pelayanan RC3S		260.478.000
D	Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan		4.934.580.000
E	Pengadaan Pakaian Dinas		196.000.000
F	Pemeliharaan kendaraan dinas		3.976.418.000
G	Perjalanan Dinas Pimpinan		2.025.944.000
5458	Pengendalian Pencemaran Udara		31.050.000.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
5458.005	Data dan Informasi Kualitas Udara [Base Line]		31.050.000.000
5458.005.001	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara	500 Kab/Kota	28.360.400.000
051	Pemantauan Kualitas Udara Secara Manual		8.320.000.000
A	pengambilan sample dan analisa Data Untuk Perhitungan IKU di 500 Kab/Kota		5.393.420.000
B	Persiapan, Perhitungan dan Evaluasi Data IKU		1.926.580.000
C	Inventarisasi Emisi dan Penyusunan Pedoman		400.000.000
D	Roadmap Peraturan terkait PPU		245.000.000
E	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak		355.000.000
052	Pemantauan Kualitas Udara Secara Otomatis	10 Unit	20.040.400.000
A	Pengadaan Peralatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis di 10 kota		12.765.090.000
B	Pendampingan dan Pengawasan Pengadaan AQMS		1.253.178.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
C	Workshop Pemantauan Kualitas Udara dalam rangka HLH 2020		207.200.000
D	Perawatan dan Pelatihan Petugas AQMS terbangun		5.814.932.000
5458.005.002	Jumlah Industri Yang memenuhi Baku Mutu Emisi	1668 industri	2.689.600.000
051	Evaluasi Kinerja Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Udara		2.689.600.000
A	Perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan pengendalian pencemaran udara dan penyusunan laporan		569.600.000
B	Pendampingan Finalisasi Pembahasan Muatan Teknis Peraturan (RPP, Genset, ISPU, Tepung Terigu)		120.000.000
C	Pemantauan Langsung Industri, Penilaian Mandiri, Supervis Provinsi, serta Evaluasi Data Hasil Pemantauan Industri		1.707.102.000
D	Dukungan Teknis Pengaduan Pencemaran Udara Sektor Industri		160.258.000
F	Penyusunan NSPK PPUSTB		132.640.000
5459	Pengendalian Pencemaran Air		158.530.000.000
5459.010	Data dan Informasi Kualitas Air [Base Line]	631 Lokasi	96.439.210.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
5459.010.001	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Air		86.625.300.000
051	Pemantauan Kualitas Air Manual	560 titik	6.965.000.000
A	Pemantauan kualitas air secara manual		6.965.000.000
052	Pemantauan Kualitas Air Otomatis	71 Titik	77.160.300.000
A	Perawatan sistem pemantauan kualitas air sungai di 16 lokasi (19 titik)		3.149.336.000
B	Pengadaan peralatan monitoring kualitas air		74.010.964.000
053	Perhitungan dan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran		1.000.000.000
A	Penetapan DTBP sungai batanghari dan sungai barito		1.000.000.000
054	Pelaksanaan Program Kali Bersih		1.500.000.000
A	Perhitungan Beban Pencemaran		323.400.000
B	Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Pengndalian Pencemaran Air Industri Prasarana dan Jasa		648.678.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
C	Muatan Teknis Rancangan Peraturan Perundang-undangan PPA		527.922.000
5459.010.002	Jumlah Industri yang Memenuhi Baku Mutu Air Limbah	1668 industri	9.813.910.000
051	Peningkatan kinerja industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		7.380.000.000
A	Pembahasan Kriteria, Mekanisme Dan Peserta Proper 2019-2020		141.440.000
B	Refreshment dan Sosialisasi Proper 2019-2020		437.670.000
C	Self Assessment (Penilaian Proper 2019-2020 Melalui Simpel)		1.275.222.000
D	Verifikasi Lapangan		1.339.894.000
E	Evaluasi Sanggahan		234.045.000
F	Supervisi		672.595.000
G	Sosialisasi Hijau		262.400.000
H	Penerimaan Dokumen Hijau Dan Evaluasi Hijau		1.196.165.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
I	Verifikasi Kandidat Emas		988.170.000
J	Pengumuman Peringkat (Public Disclosure)		832.399.000
052	Evaluasi kinerja industri dalam pengendalian pencemaran air limbah		2.433.910.000
A	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air Sektor Industri		140.304.000
B	Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan		299.970.000
C	Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstraktif		276.920.000
D	Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air Dari Hasil Verifikasi Lapangan dan Self Assessment		266.500.000
E	Penanganan Pencemaran Air Dari Sektor Industri		198.634.000
F	Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka penataan PPA dari sektor industri pengolahan		752.467.000
G	Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka peningkatan penataan PPA dari sektor industri ekstraktif		249.455.000
H	Pelayanan Izin Pengelolaan Air Limbah dengan Cara Injeksi		156.720.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
I	Penyusunan kebijakan pendukung PPA dari Sektor Industri		92.940.000
5459.011	Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum [Base Line]	1 DAS (4 unit IPAL)	12.090.790.000
051	Pengelolaan Limbah DAS Citarum		12.090.790.000
A	Persiapan		1.088.170.000
B	Kegiatan Restorasi		4.151.360.000
C	Pemantauan dan Evaluasi		302.540.000
D	Pembangunan IPAL Usaha Skala Kecil Di DAS Citarum		6.500.720.000
E	Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Pencemaran Air		48.000.000
5459.012	Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air [Base Line]	50 Unit IPAL	50.000.000.000
5459.012.001	Fasilitas Infrastruktur Hijau Pengelolaan Limbah		50.000.000.000
051	Pengelolaan Limbah		50.000.000.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
A	pembangunan IPAL USK		50.000.000.000
5460	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		25.300.000.000
5460.001	Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya [Base Line]	4 Kab/Kota	5.900.000.000
5460.001.001	Pemulihan ekosistem pesisir dan laut pada kawasan prioritas		5.900.000.000
051	Pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut		3.900.000.000
A	Wilayah I		1.800.000.000
B	Wilayah II		1.800.000.000
D	Evaluasi dan penguatan pemulihan		300.000.000
053	Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut		2.000.000.000
A	Inventarisasi Ekosistem Pesisir dan Laut		2.000.000.000
5460.006	Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya [Base Line]	34 Provinsi	15.229.600.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
051	Pemantauan kualitas air laut		5.800.000.000
052	Evaluasi Kinerja Pelabuhan	20 Pelabuhan	1.200.000.000
053	Perizinan pembuangan air limbah ke laut		1.000.000.000
A	Wil 1		600.000.000
B	Wil 2		400.000.000
054	Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean Seas)	34 Provinsi (40 Lokasi)	3.000.000.000
055	Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		3.429.600.000
A	Dokumen Perencanaan		450.828.000
B	Sistem Informasi pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut		342.500.000
C	Baku Mutu dan Kebijakan		468.716.000
D	Kerjasama		615.566.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
E	Pameran		150.000.000
F	Dukungan kordinasi dan pengembangan pelaksanaan ICM dalam rangka PPKPL		1.106.510.000
G	Ekspose dan Konsultasi Publik Program Pantai Lestari		295.480.000
056	Pengembangan Program Pesisir dan Laut Lestari		800.000.000
A	Revitalisasi program pesisir dan laut lestari		800.000.000
5460.007	Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut [Base Line]	2 Kab/Kkota	4.170.400.000
051	Penanggulangan pencemaran Tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir laut		1.000.000.000
052	Pemantauan sampah laut dan integrated coastal clean up		3.170.400.000
A	Wil 1		700.000.000
B	Wil 2		1.300.000.000
C	Pemantauan Sampah Laut		1.170.400.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
5461	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		57.138.675.000
5461.001	Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan [Base Line]		57.138.675.000
5461.001.001	Luas Lahan Terlantar Bekas Pertambangan yang Terpulihkan	77,8 Hektar	55.288.675.000
051	Pemulihan Kerusakan Lahan Bekas Tambang		53.588.675.000
A	Pemulihan Kerusakan Lahan Bekas Tambang		47.591.756.000
B	Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pengelola Lahan Paska Pemulihan		949.019.000
C	Evaluasi Pemulihan		800.000.000
D	Penyusunan Studi Kelayakan (FS)		1.000.000.000
E	Penyusunan Rancangan Teknis Terperinci (DED)		1.150.000.000
F	Perencanaan dan Pemutakhiran Data Potensi Untuk Pemulihan LAT		2.097.900.000
054	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan		1.700.000.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
A	Penyusunan Naskah Akademis dan Draft Permen Menuju Indonesia Hijau		208.500.000
B	Uji Coba Kegiatan Menuju Indonesia Hijau (Uji Publik)		175.200.000
C	Pemantauan Lapangan Potensi Peningkatan MIH		604.875.000
D	Penghitungan IKTL		367.700.000
E	Supervisi Hasil Penghitungan IKTL		343.725.000
5461.001.002	Jumlah industri yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang	80 Industri	1.850.000.000
051	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Aspek Kerusakan Lahan Industri Pertambangan		1.850.000.000
A	Pemantauan langsung industry		628.368.000
B	Evaluasi Penilaian Mandiri		433.752.000
C	Supervisi Provinsi		171.730.000
D	Evaluasi Sanggahan		320.800.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
E	Dukungan Teknis Pengaduan Pengendalian Kerusakan Lahan		295.350.000
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	1800 hektar	19.550.000.000
5462.001	Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi [Base Line]		19.550.000.000
5462.001.001	Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi	1.800 Ha	19.550.000.000
051	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dan Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG	25 KHG	12.110.397.000
A	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut		10.213.011.000
B	Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG		431.226.000
C	Dukungan Administrasi		1.466.160.000
052	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut		1.362.593.000
A	Fasilitasi dan Supervisi Penyusunan RPPEG di Tk Prop dan/atau Kab/Kota		743.583.000
B	Model Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam KHG		338.040.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
C	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPEG		280.970.000
053	Pemulihan Fungsi Hirologis Ekosistem Gambut	1.800 Ha	4.679.790.000
A	Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat		2.125.098.000
B	Program Penyiapan Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut	60 Desa	2.554.692.000
054	Evaluasi kinerja industri dalam pemulihan ekosistem gambut	300 Industri	1.397.220.000
A	Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut (21 areal usaha)		781.820.000
B	Pembahasan Penetapan Titik TMAP (Tinggi Muka Air Tanah)		615.400.000

Alokasi Anggaran Badan Restorasi Gambut Tahun 2020

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut		300,000,000,000
5462.003	Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	400.000 Hektar	300,000,000,000